

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mardiasmo. 2018. Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta : Andi Offset

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Konsep perpajakan Indonesia dan aspek formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung :
Alvabeta, CV.

Sugiyono, 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung :
Alvabeta, CV

JURNAL

Alifa R. Farah, saryadi. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib
Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Semarang Selatan

Machmudh, Nur. 2020. Pengaruh tarif pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM kuliner. Yogyakarta.

Pratama Rexi, E. Mulyani. 2019. Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Padang

Putu R. susmita, Supadmi. Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-feeling* pada kepatuhan wajib pajak. Denpasar.

Riadita Alifa, Suryadi. 2015. Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semarang.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Menjadi UU. Jakarta : sekretariat Negara

Indonesia. 2017. Keputusan Menteri Keuangan. 2017. NO 192/KMK,03/2017 pasal 1. Tentang kriteria wajib pajak. Jakarta : Sekretariat Negara

Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3). Tentang UMKM. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. 2016. Direktorat Jendral Pajak No Per-27/PJ/2016 tentang kualitas pelayanan pajak di kantor pelayanan pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan– 68/PMK.03/2017. Tentang Pengurangan Atas Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pebetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Jakarta. Sekretariat Negara.

Indonesia. 2009. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang pajak penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.